



**BUPATI FLORES TIMUR**  
**PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

PERATURAN BUPATI FLORES TIMUR  
NOMOR 3 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN BESARAN BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH  
DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI FLORES TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Besaran Bagian Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Untuk Kepada Tahun Anggaran 2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2293);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 12 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0141);
6. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 99 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2016 Nomor 99);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI FLORES TIMUR TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN BESARAN BAGIAN BAGI HSIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2017.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Flores Timur.
2. Bupati adalah Bupati Flores Timur.
3. Camat adalah Kepala Kecamatan sebagai perangkat Daerah.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa yang terdiri atas Sekretariat Desa, pelaksana teknis yang disebut Seksi dan unsur kewilayahan.
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib yang terutang oleh orang pribadi atau badan yaang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
9. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
12. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah adalah bagian penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang diberikan kepada Desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) yang diterima oleh Pemerintah Daerah.
13. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

## BAB II PENGELOLAAN

### Bagian Kesatu Pengalokasian

#### Pasal 2

Pemerintah Daerah mengalokasikan bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah paling sedikit sebesar 10% (sepuluh persen) dari besarnya pajak daerah dan retribusi daerah yang diterima oleh Pemerintah Daerah untuk setiap desa setelah dikurangi retribusi pelayanan kesehatan.

#### Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahun anggaran.
- (2) Pengalokasian bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah merupakan jumlah bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang diterima Desa untuk waktu 1 (satu) tahun anggaran.

### Bagian Kedua Besaran Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Untuk Setiap Desa

#### Pasal 4

- (1) Jumlah bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.1.506.000.000,- (satu milyar lima ratus enam juta rupiah).
- (2) Jumlah bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah untuk setiap desa diatur sebagai berikut:
  - a. sebesar 60% (enam puluh persen) dibagi secara merata kepada setiap desa; dan
  - b. sebesar 40% (empat puluh persen) dibagi secara proporsional sesuai dengan rasio jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan indeks kesulitan geografis serta realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah dari setiap desa.
- (3) Besaran bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah untuk setiap desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Bagian Ketiga

#### Pasal 5

Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

### Bagian Keempat

#### Tata Cara Penyaluran dan Pencairan Dana

#### Pasal 7

- (1) Penyaluran bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (2) Pencairan bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan sebagai berikut:
  - a. Pencairan tahap I sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari besaran bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang diterima setiap desa;
  - b. Pencairan tahap II sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari besaran bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang diterima setiap desa;
  - c. Pencairan tahap III sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari besaran bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang diterima setiap desa;
  - d. Pencairan tahap IV sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari besaran bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang diterima setiap desa.
- (3) Pencairan bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah dilakukan berdasarkan rekomendasi Camat.

### BAB III

#### PELAPORAN

#### Pasal 9

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan bagian bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada Bupati melalui Camat setiap semester.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan satu kesatuan dengan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa.

### BAB IV

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengelolaan bagian bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dilakukan oleh Camat dan secara operasional oleh satuan kerja perangkat daerah yang menangani urusan pemerintahan desa.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara fungsional dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah yang menangani urusan pengawasan fungsional lainnya.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Flores Timur.

Ditetapkan di Larantuka  
pada tanggal 24 Januari 2017

PENJABAT BUPATI FLORES TIMUR, *N*

  
/ EMANUEL KARA

Diundangkan di Larantuka  
pada tanggal 24 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN FLORES TIMUR,

  
ANTON TONCE MATUTINA

BERITA DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2017 NOMOR 3

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI FLORES TIMUR  
 NOMOR 3 TAHUN 2017  
 TENTANG  
 TATA CARA PENGALOKASIAN DAN BESARAN BAGIAN  
 BAGI HSIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH  
 UNTUK SETIP DESA TAHUN ANGGARAN 2017

BESARAN BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH  
 DAN RETRIBUSI DAERAH UNTUK SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2017

NO	KECAMATAN/DESA	KODE DESA	ALOKASI BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
1	2	3	4
I	WULANGGITANG:	53. 06. 01	94,848,000.00
	1. Ojandetun	53. 06. 01. 2001	6,988,000.00
	2. Hewa	53. 06. 01. 2002	11,571,000.00
	3. Waiula	53. 06. 01. 2003	9,072,000.00
	4. Nawakote	53. 06. 01. 2007	8,924,000.00
	5. Boru	53. 06. 01. 2008	13,319,000.00
	6. Pululera	53. 06. 01. 2009	9,098,000.00
	7. Nileknoheng	53. 06. 01. 2011	7,473,000.00
	8. Hokeng Jaya	53. 06. 01. 2012	6,999,000.00
	9. Pantai Oa	53. 06. 01. 2013	5,578,000.00
	10. Boru Kedang	53. 06. 01. 2014	9,192,000.00
	11. Klatanlo	53. 06. 01. 2021	6,634,000.00
II	ILE BURA:	53. 06. 16	46,668,000.00
	1. Riangbura	53. 06. 16. 2001	6,837,000.00
	2. Birawan	53. 06. 16. 2002	8,312,000.00
	3. Nurri	53. 06. 16. 2003	6,308,000.00
	4. Nobo Konga	53. 06. 16. 2004	6,478,000.00
	5. Lewoawang	53. 06. 16. 2005	7,113,000.00
	6. Duli Pali	53. 06. 16. 2006	5,791,000.00
	7. Riang Rita	53. 06. 16. 2007	5,829,000.00
III	TITEHENA:	53. 06. 02	96,816,000.00
	1. Kobasoma	53. 06. 02. 2001	9,423,000.00
	2. Lewolaga	53. 06. 02. 2002	7,171,000.00
	3. Lewoingu	53. 06. 02. 2003	6,051,000.00
	4. Tuakepa	53. 06. 02. 2004	6,787,000.00
	5. Tenawahang	53. 06. 02. 2005	8,436,000.00
	6. Leraboleng	53. 06. 02. 2006	6,963,000.00
	7. Serinuho	53. 06. 02. 2007	6,290,000.00
	8. Watowara	53. 06. 02. 2008	8,315,000.00
	9. Konga	53. 06. 02. 2009	7,637,000.00
	10. Ile Gerong	53. 06. 02. 2010	5,448,000.00
	11. Adabang	53. 06. 02. 2011	6,256,000.00
	12. Dun Tana Lewoingu	53. 06. 02. 2012	7,093,000.00
	13. Duli Jaya	53. 06. 02. 2013	5,761,000.00
	14. Bokang Wolomatang	53. 06. 02. 2014	5,185,000.00
IV	TANJUNG BUNGA:	53. 06. 05.	120.284.000.00
	1. Lewobunga	53. 06. 05. 2006	6,602,000.00
	2. Sina Malaka	53. 06. 05. 2007	7,460,000.00
	3. Ratulodong	53. 06. 05. 2008	8,092,000.00

1	2	3	4
	4. Sinar Hadigala	53. 06. 05. 2009	6,531,000.00
	5. Bahinga	53. 06. 05. 2010	7,785,000.00
	6. Waibao	53. 06. 05. 2011	9,426,000.00
	7. Lamatutu	53. 06. 05. 2012	9,252,000.00
	8. Laton Liwo	53. 06. 05. 2013	5,919,000.00
	9. Kolaka	53. 06. 05. 2015	9,095,000.00
	10. Bandona	53. 06. 05. 2016	7,053,000.00
	11. Nusa Nipa	53. 06. 05. 2017	6,562,000.00
	12. Patisirawalang	53. 06. 05. 2018	8,631,000.00
	13. Gekeng Deran	53. 06. 05. 2020	6,919,000.00
	14. Aransina	53. 06. 05. 2021	7,693,000.00
	15. Laton Liwo II	53. 06. 05. 2022	6,196,000.00
	16. Lamanabi	53. 06. 05. 2023	7,068,000.00
V	LEWOLEMA:	53. 06. 15	51.154.000.00
	1. Ile Padung	53. 06. 15. 2001	7,756,000.00
	2. Bantala	53. 06. 15. 2002	7,627,000.00
	3. Sinar Hading	53. 06. 15. 2003	7,527,000.00
	4. Painapang	53. 06. 15. 2004	7,244,000.00
	5. Balukhering	53. 06. 15. 2005	7,676,000.00
	6. Riangkotek	53. 06. 15. 2006	6,366,000.00
	7. Lewobebe	53. 06. 15. 2007	6,958,000.00
VI	LARANTUKA:	53. 06. 03	14,265,000.00
	1. Mokantarak	53. 06. 03. 2019	7,311,000.00
	2. Lamawalang	53. 06. 03. 2020	6,954,000.00
VII	DEMON PAGONG:	53. 06. 14	49.025.000.00
	1. Lamika	53. 06. 14. 2001	6,111,000.00
	2. Watotika Ile	53. 06. 14. 2002	6,106,000.00
	3. Lewokluok	53. 06. 14. 2003	8,116,000.00
	4. Blepanawa	53. 06. 14. 2004	7,378,000.00
	5. Kawalelo	53. 06. 14. 2005	9,050,000.00
	6. Bama	53. 06. 14. 2006	6,852,000.00
	7. Lewo Muda	53. 06. 14. 2007	5,412,000.00
VIII	ILE MANDIRI:	53. 06. 04	60.162.000.00
	1. Wailolong	53. 06. 04. 2001	8,381,000.00
	2. Lewoloba	53. 06. 04. 2002	6,760,000.00
	3. Tiwatobi	53. 06. 04. 2003	7,609,000.00
	4. Watotutu	53. 06. 04. 2004	8,317,000.00
	5. Riangkemie	53. 06. 04. 2005	8,156,000.00
	6. Lewohala	53. 06. 04. 2006	8,112,000.00
	7. Halakodanuan	53. 06. 04. 2007	6,022,000.00
	8. Mudakeputu	53. 06. 04. 2008	6,805,000.00
IX	SOLOR BARAT:	53. 06. 06	86.595.000.00
	1. Tanah Lein	53. 06. 06. 2002	7,821,000.00
	2. Lamaole	53. 06. 06. 2003	6,718,000.00
	3. Kalelu	53. 06. 06. 2004	5,615,000.00
	4. Nusa Dani	53. 06. 06. 2005	5,494,000.00



1	2	3	4
	5. Balaweling II	53. 06. 06. 2007	6,381,000.00
	6. Balaweling I	53. 06. 06. 2008	5,802,000.00
	7. Pamakayo	53. 06. 06. 2009	6,104,000.00
	8. Ongalereng	53. 06. 06. 2012	6,434,000.00
	9. Karawatung	53. 06. 06. 2013	6,333,000.00
	10. Lamawalang	53. 06. 06. 2014	5,750,000.00
	11. Daniwato	53. 06. 06. 2015	6,100,000.00
	12. Lewotanah Ole	53. 06. 06. 2017	6,461,000.00
	13. Titehena	53. 06. 06. 2019	5,558,000.00
	14. Lewonama	53. 06. 06. 2020	6,024,000.00
X	SOLOR TIMUR:	53. 06. 07	105.194.000.00
	1. Watanhura I	53. 06. 07. 2002	5,286,000.00
	2. Lebao	53. 06. 07. 2003	6,035,000.00
	3. Watohari	53. 06. 07. 2004	6,224,000.00
	4. Moton Wutun	53. 06. 07. 2005	5,670,000.00
	5. Watobuku	53. 06. 07. 2006	6,620,000.00
	6. Labelen	53. 06. 07. 2007	6,076,000.00
	7. Menanga	53. 06. 07. 2008	6,705,000.00
	8. Lohayong I	53. 06. 07. 2009	5,857,000.00
	9. Wulublolong	53. 06. 07. 2010	6,735,000.00
	10. Liwo	53. 06. 07. 2011	6,511,000.00
	11. Tanahwerang	53. 06. 07. 2012	5,854,000.00
	12. Lewohedo	53. 06. 07. 2013	5,612,000.00
	13. Lohayong II	53. 06. 07. 2014	7,646,000.00
	14. Watanhura II	53. 06. 07. 2016	6,269,000.00
	15. Lewogeka	53. 06. 07. 2017	5,967,000.00
	16. Lamawai	53. 06. 07. 2018	6,642,000.00
	17. Kewuta	53. 06. 07. 2019	5,485,000.00
XI	SOLOR SELATAN:	53. 06. 19	44.298.000.00
	1. Kalike	53. 06. 19. 2001	6,751,000.00
	2. Kalike Aimatean	53. 06. 19. 2002	6,434,000.00
	3. Sulengwaseng	53. 06. 19. 2003	6,274,000.00
	4. Kenere	53. 06. 19. 2004	5,532,000.00
	5. Lemanu	53. 06. 19. 2005	6,689,000.00
	6. Lewoggaran	53. 06. 19. 2006	6,260,000.00
	7. Bubuatagamu	53. 06. 19. 2007	6,358,000.00
XII	ADONARA BARAT:	53. 06. 08	113.911.000.00
	1. Duanur	53. 06. 08. 2008	6,148,000.00
	2. Bukit Saburi I	53. 06. 08. 2010	6,775,000.00
	3. Waiwadan	53. 06. 08. 2011	8,335,000.00
	4. Danibao	53. 06. 08. 2012	6,972,000.00
	5. Pajinian	53. 06. 08. 2013	6,225,000.00
	6. Ile Pati	53. 06. 08. 2014	6,204,000.00
	7. Wureh	53. 06. 08. 2015	5,616,000.00
	8. Tonuwotan	53. 06. 08. 2016	5,629,000.00
	9. Hurung	53. 06. 08. 2017	6,503,000.00
	10. Bugalima	53. 06. 08. 2019	6,265,000.00



1	2	3	4
	11. Homa	53. 06. 08. 2021	6,234,000.00
	12. Bukit Saburi II	53. 06. 08. 2024	6,276,000.00
	13. Kimakamak	53. 06. 08. 2026	6,206,000.00
	14. Watobaya	53. 06. 08. 2030	6,697,000.00
	15. Nimundanibao	53. 06. 08. 2032	7,255,000.00
	16. Waitukan	53. 06. 08. 2033	5,695,000.00
	17. Woloklibang	53. 06. 08. 2035	5,383,000.00
	18. Riangpadu	53. 06. 08. 2036	5,493,000.00
XIII	ADONARA TENGAH:	53. 06. 18	83.376.000.00
	1. Horowura	53. 06. 18. 2001	5,758,000.00
	2. Kokotobo	53. 06. 18. 2002	7,077,000.00
	3. Lite	53. 06. 18. 2003	7,457,000.00
	4. Kenotan	53. 06. 18. 2004	7,574,000.00
	5. Nubalema	53. 06. 18. 2005	5,933,000.00
	6. Wewit	53. 06. 18. 2006	6,679,000.00
	7. Lewobebe	53. 06. 18. 2007	5,870,000.00
	8. Baya	53. 06. 18. 2008	6,609,000.00
	9. Bidara	53. 06. 18. 2009	6,465,000.00
	10. Oesayang	53. 06. 18. 2010	6,260,000.00
	11. Hoko Horowura	53. 06. 18. 2011	5,700,000.00
	12. Lewopao	53. 06. 18. 2012	5,687,000.00
	13. Nubalema Dua	53. 06. 18. 2013	6,307,000.00
XIV	WOTAN ULUMADO:	53. 06. 09	77.657.000.00
	1. Wailebe	53. 06. 09. 2001	5,684,000.00
	2. Wotanulumado	53. 06. 09. 2002	6,127,000.00
	3. Nayubaya	53. 06. 09. 2003	5,576,000.00
	4. Oyangbarang	53. 06. 09. 2004	8,079,000.00
	5. Kawela	53. 06. 09. 2005	8,856,000.00
	6. Klukengnuking	53. 06. 09. 2006	7,349,000.00
	7. Pandai	53. 06. 09. 2007	6,532,000.00
	8. Bliko	53. 06. 09. 2008	5,676,000.00
	9. Samasoge	53. 06. 09. 2009	5,672,000.00
	10. Demondei	53. 06. 09. 2010	5,898,000.00
	11. Tobilota	53. 06. 09. 2011	6,433,000.00
	12. Tanatukan	53. 06. 09. 2012	5,775,000.00
XV	ADONARA TIMUR:	53. 06. 10	122.453.000.00
	1. Dawataa	53. 06. 10. 2003	5,160,000.00
	2. Terong	53. 06. 10. 2004	7,650,000.00
	3. Bilal	53. 06. 10. 2005	5,806,000.00
	4. Lamahala Jaya	53. 06. 10. 2006	13,903,000.00
	5. Waiburak	53. 06. 10. 2007	8,127,000.00
	6. Narasaosina	53. 06. 10. 2008	6,160,000.00
	7. Karinglamalouk	53. 06. 10. 2009	5,410,000.00
	8. Tuawolo	53. 06. 10. 2010	5,658,000.00
	9. Kiwangona	53. 06. 10. 2011	7,336,000.00
	10. Tapobali	53. 06. 10. 2012	5,713,000.00
	11. Lewobunga	53. 06. 10. 2013	6,529,000.00

1	2	3	4
	12. Bloto	53. 06. 10. 2014	6,482,000.00
	13. Ipiebang	53. 06. 10. 2015	5,614,000.00
	14. Lamalota	53. 06. 10. 2016	5,507,000.00
	15. Puhu	53. 06. 10. 2017	6,085,000.00
	16. Kwaelaga Lamawato	53. 06. 10. 2018	5,110,000.00
	17. Gelong	53. 06. 10. 2019	5,405,000.00
	18. Lelen Bala	53. 06. 10. 2020	5,241,000.00
	19. Saosina	53. 06. 10. 2021	5,557,000.00
XVI	ILE BOLENG:	53. 06. 13	118.195.000.00
	1. Bedalewun	53. 06. 13. 2001	5,262,000.00
	2. Lebanuba	53. 06. 13. 2002	5,164,000.00
	3. Riawale	53. 06. 13. 2003	5,521,000.00
	4. Bungalawan	53. 06. 13. 2004	5,147,000.00
	5. Lamawolo	53. 06. 13. 2005	6,153,000.00
	6. Halenlangowuyo	53. 06. 13. 2006	7,103,000.00
	7. Lewopao	53. 06. 13. 2007	6,516,000.00
	8. Nelereren	53. 06. 13. 2008	5,406,000.00
	9. Boleng	53. 06. 13. 2009	6,937,000.00
	10. Neleblolong	53. 06. 13. 2010	4,960,000.00
	11. Duablolong	53. 06. 13. 2011	5,990,000.00
	12. Lewokeleng	53. 06. 13. 2012	5,201,000.00
	13. Nelelamawangi	53. 06. 13. 2013	5,583,000.00
	14. Harubala	53. 06. 13. 2014	5,302,000.00
	15. Nelelamadike	53. 06. 13. 2015	5,755,000.00
	16. Lamabayung	53. 06. 13. 2016	5,624,000.00
	17. Lewat	53. 06. 13. 2017	5,257,000.00
	18. Dokeng	53. 06. 13. 2018	4,924,000.00
	19. Bajuntaa	53. 06. 13. 2019	5,022,000.00
	20. Nobo	53. 06. 13. 2020	5,851,000.00
	21. Nelelamawangi II	53. 06. 13. 2021	5,517,000.00
XVII	WITIHAMA:	53. 06. 12	95.102.000.00
	1. Watololong	53. 06. 12. 2001	5,526,000.00
	2. Tuwagoetobi	53. 06. 12. 2002	7,104,000.00
	3. Weranggere	53. 06. 12. 2003	5,735,000.00
	4. Oringbele	53. 06. 12. 2004	7,651,000.00
	5. Watoone	53. 06. 12. 2005	6,571,000.00
	6. Lamabelawa	53. 06. 12. 2006	5,867,000.00
	7. Pledo	53. 06. 12. 2007	6,841,000.00
	8. Lewopulo	53. 06. 12. 2008	5,795,000.00
	9. Sandosi	53. 06. 12. 2009	6,620,000.00
	10. Balaweling	53. 06. 12. 2010	5,627,000.00
	11. Tobitika	53. 06. 12. 2011	5,180,000.00
	12. Riangduli	53. 06. 12. 2012	5,651,000.00
	13. Waiwuring	53. 06. 12. 2013	5,117,000.00
	14. Bao Bage	53. 06. 12. 2014	5,189,000.00
	15. Lamaleka	53. 06. 12. 2015	5,404,000.00
	16. Balaweling Noten	53. 06. 12. 2016	5,224,000.00

1	2	3	4
XVIII	KELUBAGOLIT:	53. 06. 11	69.213.000.00
	1. Redontena	53. 06. 11. 2001	5,634,000.00
	2. Adobala	53. 06. 11. 2002	5,582,000.00
	3. Hinga	53. 06. 11. 2003	5,571,000.00
	4. Lamapaha	53. 06. 11. 2004	5,768,000.00
	5. Suku Tokan	53. 06. 11. 2005	5,835,000.00
	6. Nisakarang	53. 06. 11. 2006	5,301,000.00
	7. Muda	53. 06. 11. 2007	5,022,000.00
	8. Horinara	53. 06. 11. 2008	6,246,000.00
	9. Pepageka	53. 06. 11. 2009	6,322,000.00
	10. Lamabunga	53. 06. 11. 2010	7,015,000.00
	11. Mangaaleng	53. 06. 11. 2011	5,856,000.00
	12. Keluwain	53. 06. 11. 2012	5,061,000.00
XIX	ADONARA:	53. 06. 17	56.784.000.00
	1. Sagu	53. 06. 17. 2001	9,753,000.00
	2. Kolimasang	53. 06. 17. 2002	7,709,000.00
	3. Kolilanang	53. 06. 17. 2003	6,834,000.00
	4. Tikatukung	53. 06. 17. 2004	6,041,000.00
	5. Nisanulan	53. 06. 17. 2005	6,345,000.00
	6. Lamahoda	53. 06. 17. 2006	7,835,000.00
	7. Adonara	53. 06. 17. 2007	6,936,000.00
	8. Kolipetung	53. 06. 17. 2008	5,331,000.00

PENJABAT BUPATI FLORES TIMUR, 

  
EMANUEL KARA